

Implementasi Pembiayaan Pendidikan Melalui Pengelolaan Dana BOS dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan

Citra Mulya

Program Studi Magister Administrasi Pendidikan, Program Pascasarjana, Universitas Galuh. Jl. R.E Martadinata No. 150 Ciamis 46251 Provinsi Jawa Barat, Indonesia.

email: citra.mulya46@gmail.com

Abstrak – Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan: 1) Implementasi pembiayaan pendidikan melalui pengelolaan dana BOS dalam meningkatkan mutu pendidikan; 2) Hambatan dalam implementasi pembiayaan pendidikan melalui pengelolaan dana BOS dalam meningkatkan mutu pendidikan. 3) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam implementasi pembiayaan pendidikan melalui pengelolaan dana BOS dalam meningkatkan mutu pendidikan. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Adapun informan pada penelitian ini adalah kepala sekolah, guru, staf, dan stakeholder lain di SMA Negeri 1 Kadipaten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Implementasi Pembiayaan Pendidikan melalui Dana BOS di SMAN 1 Kadipaten Kabupaten Majalengka berjalan dengan efektif hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut: 1) Perencanaan Penyusunan Anggaran Biaya Pendidikan dilaksanakan dengan cermat; 2) Pelaksanaan pembiayaan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan juklas dan juknis BOS; dan 3) Pengawasan anggaran dilaksanakan dengan efektif; 2) Adanya berbagai hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan dana BOS dalam meningkatkan mutu pendidikan 3) Adanya berbagai Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan pengelolaan pembiayaan pendidikan melalui dana BOS dalam meningkatkan mutu Pendidikan.

Kata Kunci: Pembiayaan Pendidikan, BOS, Mutu Pendidikan

1. Pendahuluan

Tuntutan terhadap lulusan dan layanan lembaga pendidikan yang bermutu semakin mendesak karena semakin ketatnya persaingan dalam lapangan kerja. Salah satu implikasi globalisasi dalam pendidikan yaitu adanya deregulasi yang memungkinkan peluang lembaga pendidikan asing membuka sekolahnya di Indonesia. Oleh karena itu persaingan antar lembaga penyelenggara pendidikan dan pasar kerja akan semakin berat. Mengantisipasi perubahan-perubahan yang begitu cepat serta tantangan yang semakin besar dan kompleks, tiada jalan lain bagi lembaga pendidikan kecuali hanya mengupayakan segala cara untuk meningkatkan daya saing lulusan serta produk-produk akademik dan layanan lainnya, yang antara lain dicapai melalui peningkatan mutu pendidikan.

Mutu adalah sifat dari benda dan jasa. Setiap orang selalu mengharapkan bahkan menuntut mutu dari orang lain, sebaliknya orang lain juga selalu mengharapkan dan menuntut mutu dari diri kita. Ini artinya, mutu bukanlah sesuatu yang baru, karena mutu adalah naluri manusia. Benda dan jasa sebagai produk dituntut mutunya, sehingga orang lain yang menggunakan puas karenanya. Dengan demikian, mutu adalah paduan sifat-sifat dari barang atau jasa, yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, baik kebutuhan yang dinyatakan maupun yang tersirat. Benda dan jasa sebagai hasil kegiatan manusia yang secara sadar dilakukannya disebut “kinerja”. Kinerja itulah yang dituntut mutunya, sehingga muncul istilah “mutu kinerja manusia”. Suatu kinerja disebut bermutu jika dapat memenuhi atau melebihi kebutuhan dan harapan pelanggannya. Oleh karena itu, maka suatu produk atau jasa sebagai kinerja harus dibuat sedemikian rupa agar dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggannya.

Para pelanggan layanan pendidikan dapat terdiri dari berbagai unsur paling tidak empat kelompok sebagaimana dikemukakan Sallis (2013:123) pertama yang belajar, bisa merupakan mahasiswa/pelajar/murid/peserta belajar yang biasa disebut klien/pelanggan primer (*primary external customers*). Mereka inilah yang langsung menerima manfaat layanan pendidikan dari lembaga tersebut. Kedua, para klien terkait dengan orang yang mengirimnya ke lembaga pendidikan, yaitu orang tua atau lembaga tempat klien tersebut bekerja, dan mereka ini kita sebut sebagai pelanggan sekunder (*secondary external customers*). Pelanggan lainnya yang ketiga bersifat tersier adalah lapangan kerja, bisa pemerintah maupun masyarakat pengguna output pendidikan (*tertiary external customers*). Selain itu, yang keempat, dalam hubungan kelembagaan masih terdapat pelanggan lainnya yaitu yang berasal dari intern lembaga; mereka itu adalah para guru/dosen/tutor dan tenaga administrasi lembaga pendidikan, serta pimpinan lembaga pendidikan (*internal customers*).

Di antara masalah esensial dalam administrasi pendidikan adalah ekonomi pendidikan. Dalam skala mikro, kajian difokuskan pada masalah pembiayaan pendidikan yang meliputi penerimaan, alokasi, akuntabilitas dan efisiensi. Seberapa besar biaya harus dihitung dan dikeluarkan, dari mana saja cara mendapatkannya, prioritas apa yang mesti didahulukan dan bagaimana mengoptimalkan segala sumber dayanya. Prabu (2013:128) mengemukakan bahwa "Pembiayaan pendidikan sebagai kegiatan dalam penyelenggaraan pendidikan yang menyangkut bagaimana mencari sumber dana dan bagaimana pula menggunakannya." Selain pembiayaan pendidikan, profesionalisme guru harus didukung oleh kompetensi yang standar yang harus dikuasai oleh para guru profesional.

Menurut Surya (2013:78) bahwa "Guru yang profesional harus menguasai keahlian dalam kemampuan materi keilmuan dan ketrampilan metodologi." Guru juga harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi atas pekerjaannya baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan negara, lembaga dan organisasi profesi. Selain itu, guru juga harus mengembangkan rasa kesejawatan yang tinggi dengan sesama guru. Disinilah peran Perguruan Tinggi Pendidikan dan organisasi profesi guru (seperti PGRI) sangat penting. Untuk itu, maka pengembangan profesionalisme guru juga harus mempersyaratkan hidup dan berperannya organisasi profesi guru tenaga kependidikan lainnya.

Selanjutnya untuk melihat mutu pendidikan ditinjau dari prestasi akademik yaitu UN SMAN 1 Kadipaten hasil ujian nasional mengalami fluktuatif namun demikian nilai UN pada tahun 2019 lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya walaupun nilai yang diperoleh belum sesuai harapan. Hal tersebut diduga dikarenakan oleh beberapa faktor seperti mutu pendidikan serta pembiayaan pendidikan yang cenderung terus ditingkatkan setiap tahun.

2. Metode Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah implementasi pembiayaan pendidikan melalui pengelolaan dana BOS dalam meningkatkan mutu pendidikan. Adapun pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi obyek sesuai dengan apa adanya. Penelitian dilakukan di SMA Negeri 1 Kadipaten Kabupaten Majalengka. Untuk memperoleh data penelitian, penulis menggunakan observasi, wawancara, studi dokumentasi.

Dalam proses analisis kualitatif terdapat tiga komponen utama yang harus benar-benar dipahami, yaitu: 1) *Reduksi data*. Reduksi akan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan; 2) *Sajian Data*. Merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi lengkap yang untuk selanjutnya memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. Sajian data merupakan narasi mengenai berbagai hal yang terjadi atau ditemukan di lapangan, sehingga memungkinkan peneliti untuk berbuat sesuatu pada analisis atau pun tindakan lain berdasarkan atas pemahamannya tersebut; 3) *Penarikan simpulan dan verifikasi*. Kesimpulan merupakan hasil akhir dari suatu penelitian kualitatif. Peneliti berusaha untuk memberikan makna yang penuh dari data yang terkumpul. Simpulan perlu diverifikasi agar cukup mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Implementasi Pembiayaan Pendidikan melalui Dana BOS

Implementasi Pembiayaan Pendidikan melalui Dana BOS di SMAN 1 Kadipaten Kabupaten Majalengka berjalan dengan efektif hal ini dapat dilihat dari indikator sebagai berikut:

- a. Setiap tahunnya menyusun RAPBS dan RAPBS tersebut kemudian disahkan menjadi APBS.
- b. Menyusun RAPBS selalu berpatokan pada pedoman kerja sekolah sehingga RAPBS
- c. Dalam penyusunan RAPBS/APBS juga menyertakan kelengkapan alat pengawasan, alat pengawasan bersifat pembentukan badan pengawas anggaran.
- d. APBS yang telah disusun dan akan gunakan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program sekolah setiap tahunnya.
- e. Dalam penyusunan RAPBS selalu menggunakan berbagai strategi biasanya menggunakan Analisis Lingkungan Internal dan Analisis Lingkungan Eksternal.
- f. Setiap tahunnya kami mendapatkan bantuan dana BOS sebesar Rp.1.400.000,- yang dibayar tiap 3 bulan sekali. Dana BOS ini sangat membantu keuangan sekolah hampir 80% keuangan kami berasal dari dana BOS.
- g. Selain dana BOS kami juga mendapatkan pembiayaan yang berasal dari masyarakat berupa dana sumbangan komite sekolah yang dibayarkan tiap bulanya.
- h. Memiliki pendapatan pembiayaan pendidikan dari pemerintah dan masyarakat namun ada pembiayaan sumber lain seperti bantuan dari pihak swasta.
- i. Dalam pertanggung jawaban BOS memiliki sistem dan prosedur pembukuan dan pengeluaran anggaran yang sangat rapi berbasis IT/Website dan berbasis laporan fisik.
- j. Dalam pelaksanaan BOS mengharuskan adanya penanggung jawab dalam penerima dan pengeluaran anggaran. Penanggung jawab adalah kepala sekolah dan bendahara sekolah.
- k. Dalam pemilihan bendahara BOS bisa berasal dari guru ataupun staf TU. Penunjukkan Bendahara BOS dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan bendahara harus ahli dalam bidang pembukuan keuangan. Selain sarat formal kami juga memberikan sarat khusus yaitu amanah.
- l. Dalam pelaksanaan BOS memiliki mekanisme dan prosedur penerimaan dan pengeluaran anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kami hanya mengeluarkan belanja sesuai buku petunjuk.
- m. Dalam pelaksanaan BOS harus memiliki komunikasi dan kerjasama, kami selalu melakukan komunikasi untuk mengatasi permasalahan yang kami hadapi, disisilain kami juga melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk menjalankan BOS secara baik dan tepat.
- n. Memiliki prinsip pengawasan anggaran yaitu 11 prinsip anggaran
- o. Melaksanakan Audit dilaksanakan oleh tim audit internal dan tim audit eksternal.
- p. SMA Negeri 1 Kadipaten melaksanakan Audit dilaksanakan oleh tim audit internal dan tim audit eksternal, tim audit internal dibentuk oleh sekolah itu sendiri dan tim audit eksternal dilakukan oleh tim dari dinas pendidikan provinsi atau lembaga pemerintah yang berwenang serta pihak yang berkepentingan.
- q. SMA Negeri 1 Kadipaten selalu melaksanakan pengawasan internal, kami membentuk tim audit internal sekaligus tim pengawas internal BOS.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Abdul Malik pada tahun 2017 dengan judul "Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2017 Di SMA Islam Dempo Timur Pasean Pamekasan." Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) perencanaan dana BOS SMA Islam Dempo Timur melaksanakan penyusunan RKAS dan RAB. (2) pelaksanaan dana BOS SMA Islam Dempo Timur, penyaluran dana tiap triwulan, pengambilan dana oleh bendahara dan kepala sekolah, penggunaan dana untuk kegiatan operasional sekolah non-personalia, pembelanjaan dilakukan oleh tim belanja barang/jasa, pembukuan dilaksanakan oleh bendahara berdasarkan bukti (3) pengawasan dilaksanakan secara internal dan eksternal (4) pelaporan dana dilaksanakan setiap semester.

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar sembilan tahun. Yang menjadi sasaran program BOS adalah semua sekolah setingkat SD, SMP, dan SLTA baik negeri maupun

swasta seluruh propinsi di Indonesia. Anggaran menghendaki fungsi sebagai alat dalam perencanaan maupun pengendalian, maka anggaran harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip:

- a. Adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam sistem manajemen dan organisasi.
- b. Adanya sistem akuntansi yang memadai dalam melaksanakan anggaran.
- c. Adanya penelitian dan analisis untuk menilai kinerja organisasi.
- d. Adanya dukungan dari pelaksana mulai dari tingkat atas sampai yang paling bawah. (Fattah, 2016:50)

Keempat butir di atas dapat tercipta jika organisasi dan manajemennya berbentuk kategori yang sehat. Persoalan penting dalam menyusun anggaran adalah bagaimana memanfaatkan dana secara efisien, mengalokasikan secara tepat, sesuai dengan skala prioritas. Pengalokasian dana BOS dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Tim PKPS-BBM Pusat mengumpulkan data jumlah siswa tiap sekolah melalui Tim PKPS-BBM propinsi dan kabupaten/kota, kemudian menetapkan alokasi dana BOS tiap propinsi.
- b. Atas dasar data jumlah siswa tiap sekolah, Tim PKPS-BBM Pusat membuat alokasi dana BOS tiap propinsi.
- c. Tim PKPS-BBM Propinsi dan Tim Kabupaten/kota diharapkan melakukan verifikasi ulang data jumlah siswa tiap sekolah sebagai dasar dalam menetapkan alokasi di tiap sekolah.
- d. Tim PKPS-BBM Kabupaten/kota menetapkan sekolah yang bersedia menerima BOS melalui Surat keputusan (SK) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan kab/kota, Kepala Kandepag kab/kota, dan Dewan Pendidikan dengan dilampiri daftar nama sekolah dan besar dana bantuan yang diterima. Sekolah yang bersedia menerima BOS harus menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB).
- e. Tim PKPS-BBM kab/kota mengirimkan SK alokasi BOS dengan melampirkan daftar sekolah ke Tim PKPS-BBM propinsi, tembusan ke Pos / Bank dan Sekolah penerima BOS.

Dalam menetapkan alokasi dana BOS tiap sekolah perlu dipertimbangkan bahwa dalam satu tahun anggaran terdapat dua priode tahun pelajaran yang berbeda:

1) Pengambilan Dana BOS

- a. Tim PKPS-BBM Propinsi menyerahkan data rekening sekolah penerima BOS dan besar dana yang harus disalurkan kepada kantor Pos atau Bank Pemerintah.
- b. Selanjutnya kantor Pos/Bank pemerintah yang ditunjuk mentrasfer dana sekaligus kesetiap sekolah.
- c. Pengambilan dana BOS dilakukan oleh Kepala Sekolah dengan diketahui ketua komite sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- d. Dana BOS harus diterima secara utuh sesuai dengan SK alokasi yang dibuat oleh Tim PKPS-BBM kab/kota.

2) Pembatalan Dana BOS

Dalam hal sekolah penerima BOS mengalami perubahan sehingga tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai penerima BOS atau tutup/bubar maka bantuan dibatalkan dan dana BOS harus disetorkan kembali ke kas negara. Tim PKPS-BBM kabupaten atau kota bertanggung jawab dan berwenang untuk membatalkan sekolah penerima BOS.

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan dana BOS, tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Walaupun dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggungjawaban. Tindak pidana hanya menunjukkan kepada di larangnya suatu perbuatan.

3.2 Hambatan Dalam Implementasi Pembiayaan Pendidikan Melalui Pengelolaan Dana BOS Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan

SMA Negeri 1 Kadipaten dalam pengelolaan dana BOS dalam meningkatkan mutu pendidikan memiliki hambatan-hambatan sebagai berikut:

- a. BOS selalu datang terlambat sehingga kami harus menggunakan dana cadangan yang terkadang dipinjam dari perseorangan;
- b. Pembelanjaan dana BOS terbatas pada belanja yang telah ditetapkan berdasarkan juklak dan juknis, sehingga ada pos-pos yang tidak dicover oleh dana BOS;

- c. Pembayaran dengan sistem TNT (Transfer Non Tunai) menjadikan pembayaran cukup merepotkan karena tidak semua perusahaan/perorangan yang memiliki rekening bank, dan tidak semua yang memiliki rekening bank memiliki NPWP;
- d. Hambatan lain ketika kita akan merealisasikan pembayaran sebuah barang harus sesuai dengan anggaran sehingga kalau ada kukarangan harus ditambah, disisilain kalau harganya dibawah rencana sisanya harus dikembalikan. Sebagaimana kita ketahui harga barang selalu dinamis.

3.3 Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Hambatan Dalam Implementasi Pembiayaan Pendidikan Melalui Pengelolaan Dana BOS Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan

Berdarkan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. SMA Negeri 1 Kadipaten dalam mengatasi keterlambatan pencairan BOS, mencari dana talang dari dana komite sekolah, koperasi sekolah baik karyawan maupun koperasi siswa, dan dari perseorangan yang memiliki uang yang tidak digunakan sehingga kebutuhan operasional sekolah dapat terpenuhi dan kami akan segera membayar jika dana BOS itu cair.
- b. SMA Negeri 1 Kadipaten tetap melaksanakan juklak dan juknis sesuai dengan prosedur, untuk mengcover pembelajaran diluar juklak dan juknis maka kami mencari sumber dana lain diluar BOS misalnya dana dari komite sekolah. Namun demikian terkadang kami juga walaupun sebenarnya tidak boleh menggunakan dana penyesihan dari pembelanjaan BOS.
- c. SMA Negeri 1 Kadipaten berusaha sekuat tenaga mencari toko/perusahaan yang memiliki rekening bank dan memiliki NPWP agar dapat melakukan TNT tersebut. Namun jika tidak ada maka SMAN 1 Kadipaten bekerjasama dengan toko/perusahaan agar TNT dapat dilakukan namun melalui perusahaan yang lain. Perusahaan tersebut memberikan pembayaran tunai terhadap perusahaan yang tidak memiliki rekening dan NPWP tersebut.
- d. SMA Negeri 1 Kadipaten untuk mengatasi realisasi barang yang tidak sesuai harganya dengan anggaran maka kami selalu mencari harga yang sesuai dengan anggaran dengan melobi pihak penjual agar memberikan harga sesuai dengan anggaran yang ada kalau pun tidak berhasil kami siap mengembalikan ke kas negara, namun jika ada kekurangan harga kami biasanya menutupi dari keuangan komite sekolah.

4. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Implementasi Pembiayaan Pendidikan melalui Dana BOS di SMAN 1 Kadipaten Kabupaten Majalengka berjalan dengan efektif hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut: 1) Perencanaan Penyusunan Anggaran Biaya Pendidikan dilaksanakan dengan cermat; 2) Pelaksanaan pembiayaan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan juklas dan juknis BOS; dan 3) Pengawasan anggaran dilaksanakan dengan efektif.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan dana BOS dalam meningkatkan mutu pendidikan sebagai berikut: 1) BOS selalu datang terlambat sehingga; 2) Pembelanjaan dana BOS terbatas pada belanja yang telah ditetapkan berdasarkan juklak dan juknis; 3) Pembayaran dengan sistem TNT (Transfer Non Tunai) menjadikan pembayaran cukup merepotkan; 4) Realisasi pembayaran sebuah barang harus sesuai dengan anggaran sehingga kalau ada kukarangan harus ditambah, disisilain kalau harganya dibawah rencana sisanya harus dikembalikan.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan pengelolaan pembiayaan pendidikan melalui dana BOS dalam meningkatkan mutu pendidikan dilakukan hal-hal sebagai berikut: 1) Dalam mengatasi keterlambatan pencairan BOS, mencari dana talang dari dana komite sekolah, koperasi sekolah baik karyawan maupun koperasi siswa, dan dari perseorangan yang memiliki uang yang tidak digunakan sehingga kebutuhan operasional sekolah dapat terpenuhi dan segera membayar jika dana BOS itu cair; 2) Tetap melaksanakan juklak dan juknis sesuai dengan prosedur, untuk mengcover pembelajaran diluar juklak dan juknis maka kami mencari sumber dana lain diluar BOS misalnya dana dari komite sekolah. Namun demikian terkadang

kami juga walaupun sebenarnya tidak boleh menggunakan dana penyisihan dari pembelanjaan BOS; 3) Berusaha sekuat tenaga mencari toko/perusahaan yang memiliki rekening bank dan memiliki NPWP agar dapat melakukan TNT tersebut. Namun jika tidak ada maka SMAN 1 Kadipaten bekerjasama dengan toko/perusahaan agar TNT dapat dilakukan namun melalui perusahaan yang lain. Perusahaan tersebut memberikan pembayaran tunai terhadap perusahaan yang tidak memiliki rekening dan NPWP tersebut; 4) Untuk mengatasi realisasi barang yang tidak sesuai harganya dengan anggaran maka kami selalu mencari harga yang sesuai dengan anggaran dengan melobi pihak penjual agar memberikan harga sesuai dengan anggaran yang ada kalau pun tidak berhasil kami siap mengembalikan ke kas negara, namun jika ada kekurangan harga kami biasanya menutupi dari keuangan komite sekolah.

Daftar Pustaka

- Nasution Muhammad, 2016, *Penjaminan Mutu Pendidikan*, Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Prabumangkunegaran, Anwar, 2013, *Manajemen Sumberdaya Manusia*, Bandung: Rosdakarya
- Riswanti, Rini, 2011, *Manajemen Berbasis Sekolah dan Hasil Penelitian*, Bandar Lampung: Universitas Lampung
- Riyanto, Bambang, 2010. *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan, ed. 4*. BPFE-YOGYAKARTA.
- Sallis, Edward. 2015. *Total Quality Management in Education; Model, Teknik dan Implementasinya* (Edisi Baru). Yogyakarta: IRCiSoD.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. II, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2017, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta
- Surya, Muhammad, 2003, *Psikologi Pembelajaran dan Pengajaran*, Jakarta: Depdiknas.
- Suryadi, Ace. 2010. *Pendidikan Indonesia Menuju 2025*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Tim Penulis Dosen UPI. 2009. *Administrasi Pendidikan*, Bandung: Value Press.
- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional